

KECAMUK REVOLUSI KEMERDEKAAN DI KUNINGAN (1947-1950)

Rinaldo Adi Pratama

Pendidikan Sejarah, Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220, DKI Jakarta
Email: rinaldoadi@outlook.com

Abstract: *This research aims to find the role of locality in the revolution period. As we know that revolution period was a period that was quite important for the history of the nation because many areas are involved in this important event. The research method used is historical methods that include, heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Based on the research conducted that during the period of Indonesia's independence revolution, Kuningan had a central role in the struggle to maintain the sovereignty of the country in the eastern region of West Java, especially the Karesidenan Cirebon. Kuningan in particular Ciwaru has a stake in the struggle for independence which is the capital of refugee from the Karesidenan Cirebon government after being bombarded the center of government in Cirebon by the events of the first Dutch Military Aggression. In addition there are also wars involving civilians with the formation special troops in Kuningan. As a place of refuge in the civil administration, the Karesidenan Cirebon certainly made Kuningan as a battleground that was quite powerful in the eastern region of West Java.*

Keywords: *Revolution, Ciwaru, Kuningan, Karesidenan Cirebon*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan daerah atau lokalitas dalam kancah revolusi kemerdekaan Indonesia. Hal ini dikarenakan masa revolusi kemerdekaan Indonesia merupakan suatu masa yang cukup penting bagi perjalanan sejarah bangsa karena suasana revolusi tidak hanya dirasakan di lingkup nasional saja melainkan banyak pula daerah yang melibatkan diri dalam peristiwa penting ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode historis yang mencakup, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwasanya selama periode revolusi kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Kuningan memiliki peranan yang cukup sentral dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan negara di wilayah timur Jawa Barat khususnya Keresidenan Cirebon. Kabupaten Kuningan khususnya Ciwaru memiliki andil dalam perjuangan kemerdekaan yakni menjadi ibu kota pengungsian dari pemerintahan Keresidenan Cirebon pasca dibombardirnya pusat pemerintahan di Cirebon oleh peristiwa Agresi Militer Belanda I. Selain itu pula di Kuningan terjadi peperangan yang melibatkan rayat sipil dengan dibentuknya laskar dan kesatuan-kesatuan khusus yang ada di Kuningan. Sebagai tempat pengungsian pemerintahan sipil Keresidenan Cirebon tentu saja membuat Kuningan sebagai medan pertempuran yang cukup dahsyat di wilayah timur Jawa Barat*

Kata Kunci: *Revolusi, Ciwaru, Kuningan, Keresidenan Cirebon*

PENDAHULUAN

Selama masa revolusi kemerdekaan berlangsung dalam kurun waktu 1945 hingga tahun 1950 Indonesia mengalami perjalanan sejarah yang diwarnai oleh perjuangan untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan (Dienaputra, 2011). Kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidaklah secara langsung membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat penuh, melainkan masih diperlukan perjuangan panjang untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bagi Indonesia yang benar-benar lepas dari pengaruh asing khususnya Belanda yang dalam hal ini menjadi lawan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan.

Pada masa revolusi beberapa wilayah di lingkup Jawa Barat tidak terlepas dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan seperti pada peristiwa Bojong Kokosan, Bandung Lautan Api dan Pertempuran Gekbrong (Ekadjati, 1980). Selain di wilayah yang telah disebutkan tadi, Kuningan pun ikut andil dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Keterlibatan Kuningan pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia dapat dilihat dalam dua konteks, yakni Kuningan sebagai suatu lokasi tempat terjadinya peristiwa sejarah dan orang Kuningan sebagai para pelaku sejarahnya (Zakaria, 2011).

Keberadaan Belanda di Kuningan menyebabkan terjadinya perlawanan dari rakyat Kuningan dan menimbulkan banyak pertempuran dengan pihak Belanda (Zakaria, 2011). Penghianatan Belanda terhadap Perundingan Linggajati telah menyadarkan masyarakat Kuningan untuk menentang kembali kehadiran Belanda dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat Kuningan yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia merasa bahwa kehadiran Belanda akan membuat rakyat kembali sengsara.

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kuningan dalam usaha menentang

kehadiran Belanda di Kuningan pernah terjadi di wilayah Cilimus dan Mandirancan yang merupakan wilayah Kuningan bagaian utara dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon. Selanjutnya selain peristiwa yang terjadi di Cilimus dan Mandirancan peristiwa lain pun terjadi di Ciwaru. Di wilayah Ciwaru terdapat suatu peristiwa penting dimana Ciwaru dipilih sebagai Ibukota Pemerintahan Darurat Keresidenan Cirebon ketika wilayah Cirebon yang menjadi pusat pemerintahan sebelumnya di hancurkan oleh pasukan Belanda.

Setelah Ciwaru dijadikan sebagai pusat pemerintahan Keresidenan Cirebon, berdatanganlah para laskar-laskar pejuang yang bermarkas maupun yang hanya singgah sebentar di Ciwaru. Salah satunya adalah Pasukan Divisi Bambu Runcing dibawah pimpinan Letnan Kolonel Sutan Akbar. Pasukan Bambu Runcing dalam perjalanannya ternyata berkhianat terhadap Divisi Siliwangi. Hal ini mengakibatkan ketegangan terjadi antara Pasukan Bambu Runcing dan pihak tentara Indonesia khususnya Divisi Siliwangi semakin meruncing. Selain itu juga muncul kesatuan-kesatuan lain yang dibentuk oleh masyarakat Kuningan ketika wilayah Kuningan ditinggalkan pasca ditetapkannya Perundingan Renville (Agung, 1983).

Alasan pemilihan Kuningan khususnya Ciwaru sebagai objek penelitian, dikarenakan pada kenyataannya tulisan sejarah pada periode revolusi ini, lebih-lebih untuk sejarah lokal, khususnya Kuningan, masih sangat sedikit. Penelitian tentang Kuningan pada masa revolusi kemerdekaan yang penulis lakukan dalam rangka mengisi kelangkaan historiografi periode tersebut. Kalaupun ada yang membahas mengenai sejarah yang menyangkut Kuningan hanya mengulas mengenai sejarah Kuningan dari masa prasejarah sampai kerajaan-kerajaan masa Hindu-Buddha. Walaupun ada mengenai tentang kajian revolusi hanya mengulas sedikit saja mengenai revolusi dan tidak ada paparan

lain secara terperinci berupa deskripsi peristiwa kejadian dari revolusi tersebut.

Alasan lain dari penulis adalah ingin mencoba untuk mendokumentasikan memori ataupun ingatan para tokoh dan saksi sejarah peristiwa yang terjadi di Kuningan sekitar revolusi. Hal ini dikarenakan penulisan sejarah menyangkut dengan waktu, hal ini berdampak pada sejarah revolusi di Kuningan tidak akan terangkat dengan baik dikarenakan para saksi sejarah atau pelaku sejarah telah berusia lanjut. Kondisi seperti ini akan berdampak pada kesempatan untuk menggali peristiwa dari sumber primer menjadi semakin kecil. Penelitian ini menggunakan rentang waktu periode tahun 1947 dan berakhir pada tahun 1950. Hal ini di pilih karena menurut sumber data dan dokumen yang terdapat di Ciwaru dikatakan bahwa pada tahun 1947 Kuningan khususnya Ciwaru memainkan peranan penting sebagai basis pertahanan Keresidenan Cirebon, tidak hanya pemerintahan sipil namun militer pun ada di Kuningan. Sedangkan tahun 1950 dipilih karena seluruh pemerintahan dan basis militer Keresidenan Cirebon di Ciwaru kembali ke Cirebon setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui KMB dan Kuningan tetap termasuk wilayah Keresidenan Cirebon yang telah memberikan jasanya selama perjuangan revolusi kemerdekaan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode historis untuk menggali peristiwa revolusi yang terjadi di Kuningan. Menurut Louis Gottschalk (1975) metode historis mengandung arti proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Pernyataan Louis Gottschalk di atas menyiratkan bahwasanya metode historis merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji suatu peristiwa atau permasalahan pada masa lampau secara deskriptif dan analitis.

Dalam melakukan penelitian sejarah ini, yang dilakukan oleh penulis tidak hanya mengungkapkan peristiwa yang sudah terjadi secara kronologis, melainkan pula dilakukan analisis berdasarkan data dan fakta yang telah didapatkan di lapangan. Penggunaan metode historis dalam penelitian ini dipilih karena data dan fakta yang dibutuhkan untuk menunjang kajian yang penulis angkat merupakan fakta-fakta yang berasal dari masa lampau. Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian historis ini diantaranya, (Sjamsuddin, 2012):

1. Memilih suatu topik yang sesuai;
2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik;
3. Membuat catatan tentang itu apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung;
4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik sumber);
5. Menyusun hasil-hasil penelitian (catatan fakta-fakta) ke dalam suatu pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya;
6. Menyajikan dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti dengan se jelas mungkin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BELANDA MENYERANG PUSAT KERESIDENAN CIREBON

Belanda melakukan serangan-serangan di berbagai wilayah Republik Indonesia mulai akhir tahun 1945 sebagai akibat dari menangnya sekutu atas Jepang. Indonesia yang secara *de facto* telah menjadi sebuah negara baru tidak tinggal diam melihat serangan-serangan tentara Belanda terhadap wilayah-wilayah Indonesia termasuk di

wilayah Jawa Barat. Selain usaha melalui jalur konfrontasi dilakukan, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomatik pun terus berjalan, jalur diplomasi yang dilakukan yakni Perundingan Linggajati yang dilaksanakan pada November 1946 dan ditandatangani 25 Maret 1947 (Hermawan, 2000).

Meskipun isi perundingan bisa dikatakan menguntungkan Belanda, namun Belanda masih tidak puas terhadap cakupan wilayah yang ada dan nampaknya menginginkan seluruh tanah bekas wilayah Hindia Belanda. Sekalipun pada kenyataannya hasil perundingan tidak dapat direalisasikan sama sekali karena terdapat perbedaan interpretasi oleh kedua belah pihak terhadap isi perundingan, dimana dalam hal ini Belanda mencoba melakukan kehendaknya sendiri (Agung, 1983).

Perbedaan pendapat tersebut makin meningkat sampai akhirnya secara sepihak seolah-olah Belanda ingin menghilangkan adanya Perundingan Linggajati tersebut dengan jalan mengkhianati isi Perundingan Linggajati. Pernyataan ini diperkuat oleh Sewaka bahwa,

...Perdjandjian Linggardjati sebagai satu perdjandjian jang tidak akan membawa kepada tudjuan jang di tjita-tjitakan oleh bangsa Indonesia. Bahkan beberapa dari mereka berkata, bahwa perdjandjian Linggardjati adalah hanja merupakan satu djalan bagi Belanda untuk mendjadjah Indonesia kembali. Memang didalamnja nampak benar politik Belanda jang telah berabad-abad dilakukan di Indonesia, ialah siasat "memetjah-belah" (Sewaka, 1955).

Ketegangan akibat perbedaan penafsiran tentang isi Perundingan Linggajati semakin memuncak, sampai pada akhirnya Perundingan Linggajati dilanggar dengan melakukan aksi militer pertama pada tanggal 21 juli 1947 (Lubis, 2003). Agresi Militer Belanda I bertujuan untuk menyerang wilayah

Republik Indonesia dari berbagai arah baik darat, laut dan udara. Untuk wilayah Jawa Barat, Serangan Belanda ke wilayah Keresidenan Cirebon dimulai dengan kekuatan 2 batalyon artileri medan, 1 skuadron tank, 1 skuadron panser, 1 kompi zeni lapangan dan kesatuan bantuan lainnya (Soetanto, 2007). Pasukan yang terus bergerak dari arah barat ini dipimpin oleh Mayor van Santen dari KNIL dan dibantu oleh pasukan udara dari Divisi 7 Desember terus memaksa masuk ke wilayah Keresidenan Cirebon khususnya pusat militer dan sipil di Kota Cirebon, maka pasca serangan tersebut dikuasailah Tomo, Kadipaten, Majalengka dan Kota Cirebon.

Sebagai akibat dari Agresi Militer Belanda I, akhirnya membuat pertahanan dari pasukan Siliwangi di Keresidenan Cirebon tidak karuan dan tercerai berai (Soetanto, 2007). Hal ini telah memaksa seluruh unsur baik sipil maupun militer untuk melakukan evakuasi ke daerah yang dirasa aman dan jauh dari jangkauan pasukan Belanda sebagai akibat dari lumpuhnya aktivitas di Cirebon karena digempur selama dua hari berturut-turut oleh Belanda.

Akibat kondisi dan situasi yang tidak menentu pada pertengahan tahun 1947 yang mengakibatkan roda pemerintahan terganggu, maka Dewan Pertahanan Daerah (DPD) Keresidenan Cirebon dan pimpinan Brigade V/SGD Divisi Siliwangi melakukan rapat untuk menentukan wilayah pengungsian. Dari beberapa wilayah di Keresidenan Cirebon seperti Majalengka, Indramayu dan Kuningan, hasil rapat memutuskan bahwasanya wilayah pedalaman Kuningan yang masih aman dapat dijadikan daerah pengungsian sekaligus menjalankan kegiatan pemerintahan darurat. Pertimbangan ini didasarkan karena wilayah Indramayu dan Majalengka sudah dikuasai oleh Belanda terlebih dahulu dan akses dari Cirebon yang merupakan basis Belanda terlalu dekat (Wawancara dengan E. Madrochim, 2014). Alasan lain tidak

dipilihnya wilayah Indramayu dan Majalengka diperkuat oleh Pustakaningrat (1987) bahwa,

Serangan mendadak yang dilakukan Belanda untuk mengimbangi kekuatan TNI menyebabkan merosotnya moril rakyat dan tentara, dan setelah Brigade V berhasil menduduki Kota Cirebon, maka untuk dapat menguasai seluruh daerah, dilakukan pendudukan kota-kota dan persimpangan-persimpangan jalan. Indramayu, Kadipaten, Jatibarang dan Majalengka akhirnya dijadikan pangkalan Belanda.

Setelah ditetapkan bahwa wilayah Kuningan yang akan dijadikan tempat pengungsian pemerintahan darurat, terdapat dua pilihan tempat pengungsian pemerintahan darurat Keresidenan Cirebon yaitu wilayah Kecamatan Mandirancan dan Kecamatan Ciwaru (Hermawan, 2000). Namun apabila dilihat dari faktor jarak Mandirancan terhadap Kota Cirebon yang dekat dan memiliki akses yang mudah dikhawatirkan akan mudah dikuasai kembali oleh Belanda. Hal ini diperkuat dengan terjadinya penyerangan terhadap wilayah Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon oleh Belanda pada Agresi Militer Belanda I yang akhirnya masuk ke wilayah Kuningan melalui Mandirancan (Dian, 2007). Maka pilihan lokasi kedua yakni Ciwaru yang dipilih sebagai lokasi pengungsian pemerintahan darurat Keresidenan Cirebon sekaligus menjadi pusat pertahanan. Adapun unsur-unsur yang melakukan evakuasi ke pedalaman Kuningan di antaranya (Dewan Harian Cabang '45 Kabupaten Kuningan, 2006):

1. Pemerintahan darurat sipil Keresidenan Cirebon pimpinan Residen Hamdani memindahkan kegiatannya ke Kecamatan Ciwaru.
2. Komando Brigade V Divisi Siliwangi pimpinan Letkol Abimanyu memindahkan

kegiatannya ke Desa Cipedes Kecamatan Ciniru.

3. Markas Komando Pertahanan Laut Cirebon (ALCA-III) pimpinan Letkol (laut) H. P. Simanjuntak memindahkan kegiatannya Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana.
4. Kesatuan Induk Resimen XII Cirebon pimpinan Letkol Mufraeni Mu'min memindahkan kegiatannya ke Desa Pakapasan Kecamatan Ciniru.
5. Komandan Batalyon I Kapten Umar Wirahadikusumah memindahkan kegiatannya ke wilayah Kuningan Barat di Desa Sagarahiang.

Seluruh jajaran baik tokoh-tokoh politik maupun petinggi militer yang ada di Cirebon menganggap bahwa wilayah Kabupaten Kuningan merupakan lokasi yang tepat untuk dijadikan lokasi evakuasi dan basis pertahanan. Pemilihan Kuningan sebagai lokasi untuk evakuasi didasarkan karena di Kuningan terdapat banyak pegunungan yang masih banyak hutan belantara dan perkampungan-perkampungan yang jauh dari kota yang tidak bisa dijangkau oleh Belanda (Wawancara dengan E. Madrohim, 2014).

KUNINGAN MENGHADAPI AGRESI MILITER BELANDA I

Berbicara mengenai pertimbangan dipilihnya Ciwaru sebagai pusat pemerintahan darurat Keresidenan Cirebon antara lain karena Ciwaru merupakan daerah yang terletak di Pedalaman Kuningan berada di kaki bukit Gunung Tilu dan berjarak sekitar 30 km sebelah tenggara Kota Kuningan atau sekitar 70 km sebelah selatan Kota Cirebon yang menjadi pusat pasukan Belanda (Dewan Harian Cabang '45 Kabupaten Kuningan, 2006). Perpindahannya terjadi pada tanggal 25 Juli 1947, hal ini didasarkan pada peristiwa pendudukan Cirebon yang terjadi pada tanggal 23 Juli 1947 dan

pada 24 Juli 1947 diadakannya rapat penentuan ibu kota pengasingan. Selain itu juga penyerangan Belanda ke Kuningan pada tanggal 27 Juli 1947 yang mana Ciwaru sudah menjadi Ibu Keresidenan Cirebon. Ciwaru merupakan tempat yang strategis, jauh dari jangkauan pasukan Belanda yang telah menduduki Cirebon dan sebagian wilayah Kuningan.

Pasca perpindahan pusat pemerintahan sipil Keresidenan Cirebon pada 25 Juli 1947 ke Kuningan, selang dua hari yakni tanggal 27 Juli 1947 pasukan infanteri Belanda datang menyerang Kuningan dengan menggunakan kekuatan kendaraan berat dan kekuatan zeni. Pasukan Belanda datang dari arah timur Cirebon (Wawancara dengan Juhari, 2014). Dalam penyerbuannya ke Kuningan pasukan Belanda berhasil menduduki dua kecamatan yakni Kecamatan Cilimus dan Kecamatan Mandirancan. Dalam usaha untuk mempertahankan Kota Kuningan terhadap serangan pasukan Belanda yang sudah masuk dari arah utara. Pasukan yang tergabung dalam Batalyon IV/XII/DIV/SGD melakukan pencegahan di Ciloa dan Cirendang (Dewan Harian Cabang '45 Kabupaten Kuningan, 2006). Adapun pemilihan Ciloa dan Cirendang karena lokasi yang strategis, yang mana terdapat bukit di pinggir jalan yang akan dilalui oleh pasukan Belanda untuk menuju wilayah Kuningan kota, adapun wilayah perbukitan tersebut dikenal dengan nama Ciharendong.

Dalam upaya penghadangan tersebut pasukan TNI menderita kerugian dengan gugurnya Sersan Mayor Bundjali dan tertawannya Letnan Muda Ano Suwarno. Setelah berhasil menduduki Kota Kuningan, Belanda berusaha untuk menduduki kota-kota kecamatan yang masih dikuasai oleh TNI dan para pejuang lainnya. Setelah gagal menahan pasukan Belanda di pos Ciloa-Cirendang, maka pasukan Siliwangi melakukan langkah untuk mundur ke wilayah pedalaman di daerah selatan Kuningan (Wawancara dengan Juhari

2014). Pasukan Belanda dibiarkan masuk ke wilayah Kota Kuningan dan seluruh pejuang Kuningan memilih untuk mengundurkan diri ke pedalaman, hal ini dilakukan dengan maksud supaya tidak ada kehancuran yang besar di wilayah Kota Kuningan dan juga dikarenakan senjata yang ada di pihak pasukan Divisi Siliwangi tidak seimbang dibandingkan dengan persenjataan yang lengkap di pihak Belanda. Sementara itu pasukan yang terpecah-pecah sebagai akibat dari serangan Belanda tersebut segera berkumpul di tempat-tempat yang telah ditentukan sebelumnya yang kemudian menjadi daerah kantong-kantong gerilya.

Keadaan yang dialami oleh TNI dan pejuang yang ada di Kuningan segera diketahui oleh Panglima Divisi Siliwangi yakni A. H. Nasution yang berkedudukan di Tasikmalaya. Sementara itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Panglima Divisi Siliwangi segera menugaskan Kapten Abdul Gani untuk menghimpun dan mengkoordinasikan pasukan tentara Indonesia dalam sebuah brigade yang baru. Brigade yang baru dibentuk itu bernama Komando Militer Daerah (KMD) daerah Keresidenan Cirebon, terdiri dari lima Komando Daerah Gerilya (KDG). KDG I pimpinan Kapten Pitoyo, KDG II pimpinan Kapten Rukman, KDG III pimpinan Kapten Umar Wirahadikusumah, KDG IV pimpinan Kapten Yusuf, KDG V pimpinan Kapten Sangun dan Komando Militer Kota (KMK) Cirebon pimpinan Kapten Hutagaol (Nasution, 1979).

Disamping itu pasukan-pasukan yang mundur dari Cirebon yang terdiri dari Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Polisi Negara Republik Indonesia (PNRI) ikut pula bergabung dengan pasukan Batalyon IV/XII/DIV/SGD. Mengingat situasi dan kondisi pada saat itu maka nomor batalyon tidak dipergunakan lagi, melainkan digunakan sebutan Batalyon Rukman. Daerah gerilya dibagi menjadi dua. Daerah Gerilya I dipimpin oleh Mayor Rukman dan Daerah Gerilya II dipimpin oleh

Kapten Umar Wirahadikusumah. Sementara itu staf batalyon yang berkedudukan di Tundagan dipindahkan ke Kampung Cikahuripan Desa Parakan Kecamatan Lebakwangi.

Dengan taktik dan strategi baru yang digunakan oleh pasukan Siliwangi yakni bergerilya, pasukan Siliwangi telah memaksa lawan untuk melakukan pertempuran yang melelahkan, serangan yang tiba-tiba kemudian menghilang ke hutan-hutan terjadi di Kuningan (Wawancara dengan E. Madrohin, 2014 ; Sa'i, 2014). Dalam melancarkan aksi gerilyanya pasukan Siliwangi mendapatkan bantuan penuh dari rakyat. Perjuangan Siliwangi dalam melawan Belanda selama Agresi Militer I tentu tidaklah akan menemui jalan mulus apabila tidak mendapat bantuan dari rakyat, karena aksi gerilya sepenuhnya butuh sokongan rakyat yang bertugas membantu, merawat dan menyembunyikan gerilyawan. Seperti yang diungkapkan oleh Nasution (1984) bahwa,

...Gerilya dapat melakukan tugasnya karena rakyat menjadi "jawatan-jawatan dan senjata-senjata bantuannya". Dengan bantuan rakyat dapatlah ia selalu memperoleh keterangan-keterangan mengenai musuh, mengenai dislokasi, gerakan-gerakan, kekuatan-kekuatan dan lain-lain. Karena rakyat berada di sekeliling musuh dan rakyat juga bergaul dengan musuh-musuh. Dengan bantuan rakyat yang bersimpati rasanya terbukalah pintu sampai ke markas-markas dan tempat-tempat tidur musuh.

Usaha dari rakyat Kuningan dan pasukan Siliwangi dalam melakukan tekanan-tekanan dan gangguan terhadap keberadaan Belanda dengan cara gerilya ternyata berhasil dengan baik. Serdadu Belanda tak kunjung merasakan ketenangan karena sewaktu-waktu mendapat "gangguan" dan "pengacauan" yang dilakukan oleh pejuang-pejuang yang tidak berseragam. Pasukan Siliwangi dan rakyat selalu

melakukan serangan gerilyanya pada malam hari guna menghindari serangan balasan dari Belanda. Hal ini dilakukan karena ketika malam hari pasukan Belanda tidak dapat leluasa beraktivitas karena belum menguasai dan hapal wilayah dengan baik (Wawancara dengan S'ai, 2014).

Pada masa revolusi kemerdekaan, Kabupaten Kuningan hanya mempunyai 14 Kecamatan yakni Kecamatan Kuningan, Jalaksana, Cilimus, Mandirancan, Kadugede, Subang, Garawangi, Ciniru, Lebakwangi, Ciawigebang, Cidahu, Luragung, Ciwaru dan Cibingbin. Namun hingga hingga pasukan TNI yang terdapat di daerah gerilya II dan III meninggalkan basis pertahanannya di wilayah pedalaman Kuningan untuk hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta di awal tahun 1948, pasukan Belanda hanya mampu menduduki dan menguasai lima wilayah kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kuningan pada saat itu (Zakaria, 2011). Adapun lima kecamatan yang berhasil diduduki oleh Belanda antara lain Kecamatan Kuningan, Kecamatan Cilimus, Kecamatan Ciawigebang, Kecamatan Kadugede dan Kecamatan Cidahu (Zakaria, 2011; Dewan Harian Cabang '45 Kabupaten Kuningan, 2006).

Semenjak ditetapkannya Kuningan khususnya Ciwaru sebagai Ibu Kota Darurat Keresidenan Cirebon, mengalir arus pengungsian dari berbagai unsur, baik pemerintahan sipil, militer dan penduduk Cirebon. Selain dari unsur penduduk yang mengungsi, turut pula unsur-unsur dari pihak pejuang yang tergabung dalam kelaskaran pejuang. Pasukan yang pertama datang ke Kuningan pada awal Agustus 1947 adalah pasukan kelaskaran yang dikenal dengan Pasukan Istimewa (PI) berkekuatan satu batalyon dipimpin oleh Kapten Syafei dan Letnan Said. Selanjutnya ratusan pengungsi secara bergelombang datang ke Ciwaru, baik pegawai pemerintah dari berbagai jawatan dan instansi, Keresidenan /Kabupaten Cirebon, kepolisian wilayah

Keresidenan Cirebon serta Kabupaten Cirebon, tokoh-tokoh politik, tokoh masyarakat dan tidak sedikit rakyat biasa yang turut mengungsi ke Desa Ciwaru dan desa-desa lainnya di Kabupaten Kuningan yang cukup aman dari jangkauan pihak Belanda.

Selain laskar-laskar perjuangan dan komponen pemerintahan Keresidenan Cirebon datang pula Divisi Bambu Runcing pimpinan Sutan Akbar dari Yogyakarta yang diutus dan mendapat tugas resmi untuk mengamankan Jawa Barat khususnya Ciwaru dari Jenderal Sudirman. Menyusul pula pasukan Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) dan kehadiran Batalyon 400 Tentara Republik Indonesia Pelajar pimpinan Salamun A.T. dan A.F. Wirasutisna ke Ciwaru mendapat sambutan hangat dari masyarakat.

Kedatangan anggota pemerintahan sipil maupun militer serta datangnya para pengungsi diterima dengan baik oleh masyarakat Ciwaru dengan tangan terbuka. Rakyat Ciwaru membukakan pintu selebar-lebarnya bagi para pejuang dan pemerintahan sipil untuk menjadikan Ciwaru sebagai tempat pengungsian sementara. Mereka merelakan rumahnya untuk dipakai kantor-kantor pemerintahan, kantor militer Republik Indonesia tempat pemondokan dan dapur umum. Ciwaru mendadak dibanjiri pengungsi sebagian lagi menyebar ke desa di wilayah Kecamatan Ciwaru seperti Desa Citundun dan Desa Pabuaran yang sekarang menjadi Desa Linggajaya Kecamatan Karangancana (Wawancara dengan M. Setiadi, 2014). Ciwaru benar-benar menjadi pusat daerah perjuangan perang kemerdekaan yang sangat ramai yang mana sebelumnya Ciwaru hanyalah sebuah desa yang tanpa kendaraan bermotor dan tanpa adanya penerangan listrik namun kondisi Ciwaru berubah ketika tahun 1947.

Sejak Ciwaru menjadi Ibu Kota Keresidenan Cirebon sekaligus menjadi basis pertahanan Republik Indonesia banyak sekali bantuan rakyat Ciwaru yang diberikan kepada pemerintahan

sipil maupun militer. Salah satu contohnya demi kelancaran roda pemerintahan, sejumlah perumahan rakyat dijadikan kantor dinas atau instansi baik tingkat keresidenan maupun tingkat kabupaten. Rakyat Kecamatan Ciwaru yang masih memiliki sifat ketimurannya dengan semangat gotong royong dan tolong menolong, rela memberikan apa saja yang sedang dibutuhkan oleh para pejuang demi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Masyarakat Ciwaru tidak hanya merelakan rumahnya dipakai untuk berbagai kepentingan, namun juga dengan situasi dan kondisi mereka yang serba susah dengan adanya agresi militer namun mereka juga rela menyumbangkan bahan makanan berupa beras, hasil tani dan lainnya demi kelangsungan perjuangan.

Gerakan untuk mengorganisir dan mempersatukan kekuatan para pelajar antara lain Achmad Hanafi, E. Yunani, Djohari, A. Usman, Anang Setiana, D. Kadarisman, Usnen Setiadi dll. Gerakan tersebut masih belum terwadahi dengan suatu kumpulan yang paten maka dari itu terbentuklah Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) Keresidenan Cirebon dengan ketuanya Boy Suhesti dengan para pengurus lainnya antara lain Nana Yuhana, D. Kadarisman, Anang Setiana, Usnen Setiadi dll.

Disamping para pelajar mengorganisasikan dirinya dalam suatu wadah perkumpulan dengan nama IPI, para guru-guru SLTP dan SLTA yang non-kooperatif terhadap Belanda, baik itu yang berdatangan dari wilayah Cirebon dan Kuningan mendirikan SMP negeri menumpang di Sekolah Rakyat Ciwaru dan didirikan pula sekolah-sekolah guru bertempat di Desa Gunung Jawa yang sekarang berubah nama menjadi Desa Karangancana. Salah seorang guru SMPN-SG tersebut ialah Talam Amipradja.

Pada bulan Oktober 1947 kepala polisi Kabupaten Kuningan mendidik 30 orang pemuda menjadi *half* polisi (pembantu polisi). Disamping itu juga ratusan rakyat dan pemuda bergabung

dengan tentara, badan-badan kelaskaran dan badan-badan perjuangan lainnya. Untuk lebih meningkatkan tekanan-tekanan gerilya pada kedudukan-kedudukan Belanda, maka diadakannya pembagian daerah sebagai berikut:

1. Pasukan komando serta staf batalyon di bawah pimpinan Mayor Rukman berkedudukan di Cikahuripan, Desa Parakan Kecamatan Lebakwangi.
2. Daerah gerilya Kuningan barat bermarkas di Sagarahyang meliputi wilayah Sagarahyang, Cikadu, Bayuning dan sekitarnya sampai dengan perbatasan Jalaksana, di bawah pimpinan Kapten Umar Wirahadikusumah.
3. Daerah Kuningan barat sebelah selatan sampai dengan perbatasan Majalengka dan sekitarnya dipimpin oleh Letnan Latief.
4. Daerah Kuningan timur daerah Ciawigebang dan sekitarnya sampai dengan perbatasan Sindanglaut dipimpin oleh Kapten Mustofa Sudirdja.
5. Daerah gerilya Kuningan utara dan daerah Cirebon selatan dipimpin oleh Kapten Machmud Pasha.
6. Daerah Kuningan timur tergabung sepasukan MB atau *Mobile Brigade* pimpinan Diari yang berkedudukan di Segong dan Cibingbin.

Disamping pasukan-pasukan gerilya tersebut, yang tergabung dalam kesatuan TNI terdapat pula pasukan-pasukan bersenjata kelaskaran yang bergerilya di dalam daerah Kabupaten Kuningan, adapun kelaskaran yang ada di wilayah Kuningan adalah:

1. Pasukan Hizbullah yang berkedudukan di Kutaraja di bawah pimpinan Asnapi.
2. Pasukan Hizbullah yang berkedudukan di Desa Gunung Jawa di bawah pimpinan Uhan Sukanta.

3. Pasukan Hizbullah yang berkedudukan di Kampung Jagasara Desa Cieurih Kecamatan Cidahu di bawah pimpinan Unus.
4. Pasukan Hizbullah yang berkedudukan di Sindang Jawa yang kemudian menggabungkan diri dengan pasukan gerilya pimpinan Djadjang Sudirdja.
5. Pasukan Hizbullah yang berkedudukan di Timbang, di daerah Kuningan timur di bawah pimpinan Sutio.

Sementara itu untuk kelangsungan serta kelancaran gerilya maka disusunlah petugas-petugas wilayah atau petugas teritorial yang pada saat itu sasarannya diarahkan pada pelayanan serta bantuan kepada pasukan-pasukan bersenjata yang melakukan perang gerilya.

KUNINGAN PADA MASA PERUNDINGAN RENVILLE

Di wilayah Kuningan, beberapa di antara jalan penghubung yang dilalui oleh Belanda mendapat julukan "jalan maut/jalan kematian" (Nasution, 1979). Jalan-jalan ini seperti jalan antara Cirebon-Ciamis dan jalan antara Kuningan-Cikijing (Pustakaningrat, 1984). Disaat Belanda mulai terjepit dan lemah akibat dilancarkan sistem *wehrkreise* oleh Divisi Siliwangi, mereka pun akhirnya kembali menjalankan taktik diplomasinya. Pada tanggal 17 Januari 1948 terjadi Perundingan Renville antar pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda. Perundingan Renville yang menghasilkan beberapa keputusan membawa akibat lebih parah lagi bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Salah satu keputusan dari Perundingan Renville yang membuat sulit perjuangan pihak militer adalah kebijakan yang menyebutkan bahwa pasukan TNI harus dipindahkan dari daerah yang ada di bawah kekuasaan Belanda ke daerah yang sepenuhnya di

bawah kekuasaan Republik Indonesia. Hal ini pun tentu mendorong TNI yang ada di Jawa Barat harus hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta, Ibu kota Republik Indonesia dan hal ini mengharuskan pula kesatuan-kesatuan yang ada di Kuningan mengikuti aturan yang telah disepakati untuk hijrah ke Yogyakarta.

Adapun proses hijrah yang terjadi di Kuningan, kesatuan-kesatuan yang ada di wilayah Kuningan selatan dan timur berkumpul di Ciwaru untuk kemudian berangkat menuju Kota Cirebon dan selanjutnya menuju Yogyakarta. Kesatuan-kesatuan yang berada di wilayah Kuningan barat dan utara berkumpul di wilayah Kuningan kota untuk selanjutnya berangkat pula ke Cirebon melaksanakan hijrah. Sejak tanggal 2 Februari 1948, pasukan berangkat melalui 2 jalur yaitu jalur laut, pasukan dikumpulkan di Pelabuhan Cirebon, kemudian dengan kapal laut berangkat menuju Pelabuhan Rembang dan jalur darat, pasukan berangkat dengan kereta api setelah dikumpulkan di Stasiun Prujakan Cirebon berangkat menuju Gombong (Soetanto, 2007).

Proses hijrah tidak sepenuhnya diikuti oleh semua pasukan di Kuningan sendiri tidak semua tentara dan badan-badan perjuangan ikut hijrah ke Yogyakarta, ada sebagian pasukan yang sengaja ditinggalkan di wilayah Kuningan untuk terus menggalang kekuatan melawan Belanda dan melakukan pembinaan kepada masyarakat agar tidak ikut ke Belanda. Hal ini dilakukan oleh sebagian besar anggota Tentara Pelajar Batalyon 400 dan anggota Laskar Wanita Indonesia sesuai instruksi dari Letkol Abimanyu (Wawancara dengan Bapak Juhari, 2014 ; E. Madrohi, 2014).

Rakyat Ciwaru setelah ditinggalkan oleh pemerintahan sipil dan tentara serta kesatuan-kesatuan pejuang republik tidak tinggal diam dan tunduk kepada pihak Belanda. Mereka menghimpun dan menggalang kekuatan rakyat dalam menghadapi Belanda atas perintah komandan Brigade V Divisi Siliwangi.

Mereka membentuk kembali Kesatuan Perjuangan Rakyat Murba (KPRM) dan laskar gerilyanya melakukan perang gerilya di bawah pimpinan Imam Hidayat, Achmad Bagdja, A. Hanapi, E. Yuhana dan lainnya. Anggota KPRM terdiri dari tentara dan pasukan kelaskaran yang tidak ikut hijrah ke Yogyakarta dan para pemuda serta masyarakat yang ingin terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Untuk selanjutnya KPRM membentuk pemerintahan sipil darurat dengan mengangkat Abdurachman (Sekertaris Keresidenan Cirebon) yang tidak ikut hijrah menjadi Residen Cirebon menggantikan Residen Hamdani yang ikut hijrah ke Yogyakarta, lalu untuk mengisi kekosongan sekertarisnya diangkat Hartono. Kemudian A. Subroto dan Achmad Warkim yang merupakan anggota KPRM ditugaskan untuk menghubungi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta untuk meminta legalisasi Pemerintahan Darurat Keresideann Cirebon pimpinan Abdurachman, dan akhirnya Kementerian Dalam Negeri mengesahkan dan mengakui Pemerintahan Keresidenan Darurat Cirebon yang dipimpin oleh Abdurachman. Hubungan Pemerintahan Darurat Keresidenan Cirebon dengan pemerintah pusat berjalan dengan baik dan lancar. A. Subroto yang ditugaskan sebagai kurir beberapa kali pulang pergi ke Yogyakarta untuk terus melaporkan situasi dan keadaan yang terjadi di wilayah Keresidenan Cirebon khususnya Ciwaru, Ciniru dan Subang yang menjadi pusat gerilya pada masa revolusi.

Dari hasil wawancara dengan bapak M. Setiadi dapat diketahui bahwasanya Belanda masuk ke wilayah Ciwaru pada tahun 1948, sebelum tahun tersebut belum pernah ada tentara Belanda yang berhasil masuk wilayah Ciwaru, namun kalau pesawat Belanda biasanya sering lewat di atas wilayah udara Ciwaru. dipertengahan tahun 1948 Ciwaru

diduduki oleh militer Belanda dan berdirilah pemerintahan *recomba*. Kehadiran militer Belanda ini telah mempersempit ruang gerak dari para pejuang yang ada di Ciwaru. Namun walaupun gerak-gerik dan aktivitas rakyat tidak luput dari pengawasan Belanda, para pejuang di Ciwaru tidak kehabisan akal. Rakyat dan pejuang mengatur taktik dan strategi baru, misalnya pengumpulan bahan makanan dan obat-obatan yang dikumpulkan oleh para wanita penjual makanan. Para penjual makanan ini berpura-pura menjual dagangan mereka padahal sebenarnya mereka mengumpulkan makanan dari pintu ke pintu yang pada akhirnya dijadikan bahan logistik bagi pejuang yang berjuang melawan Belanda (Wawancara dengan Mulyadi, 2014 ; M. Setiadi, 2014).

Kegiatan lainnya pun banyak dibantu oleh para pelajar di Ciwaru, tentara Belanda tidak menaruh curiga kepada para pelajar dan penjaja makanan maka dari itu mereka cukup bebas untuk menjalankan aktivitas dalam membantu pejuang. (Wawancara dengan M. Setiadi, 2014). Para pelajar turut membantu mengumpulkan "*pelor*" atau amunisi dari markas-markas Belanda, mereka mengumpulkan amunisi tersebut sambil berpura-pura main disekitar markas Belanda dan setelah berhasil, amunisi yang didupakannya disembunyikan dalam roti yang dibawa oleh para pelajar dan akhirnya dikumpulkan di markas pejuang Indonesia.

Seperti halnya Perundingan Linggajati, Perundingan Renville yang telah dilakukan antara kedua belah pihak harus kandas dengan penghianatan dari pihak Belanda dengan melancarkan aksi Agresi Militer Belanda II. Pada tanggal 19 Desember 1948, secara mendadak serdadu Belanda melakukan Agresi Militer Belanda II, mereka menyerang dan menduduki Ibu Kota Yogyakarta yang menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Ketika terjadi agresi tersebut pasukan Siliwangi sudah keluar dari Yogyakarta melakukan *longmarch*

menuju daerah Jawa Barat (Soetanto, 2007). Pada awal tahun 1949 pasukan Siliwangi mulai berdatangan kembali ke daerah Jawa Barat dan Ciwaru menjadi jalan utama dan tempat beristirahat sebagian TNI dari Yogyakarta yang akan menyebar ke daerah Jawa Barat lainnya. Kedatangan dari pasukan Siliwangi yang melewati Ciwaru disambut gembira oleh masyarakat dan KPRM pada khususnya.

Pasukan yang pertama kali datang ke wilayah Ciwaru adalah satuan batalyon yang dipimpin oleh Mayor Rukman. Masyarakat Ciwaru menyambut gembira dan mengelu-elukan kedatangan dari Batalyon Rukman. Untuk menjamin pasukan TNI yang datang bergelombang, KPRM mengumpulkan bahan makanan dari warga dan mengatur penempatan TNI. Yang mengatur semuanya adalah Natadisastra, E. Yuhana, A. Hanafi, Wasita, S. Barnita, R. Mijralsamsu, Nata Rastam dan lainnya. Dapur umum dipimpin oleh Muhati Yuhana dari pimpinan Laskar Wanita Indonesia (LASWI) Kecamatan Ciwaru. Perlakuan masyarakat Ciwaru itulah sebagai bukti kepatuhan dari rakyat Ciwaru terhadap Republik Indonesia dan TNI ketika ditinggal hijrah.

Ketika Batalyon Rukman datang ke Jawa Barat khususnya wilayah Ciwaru Kuningan, dia tidak menggunakan istilah Batalyon Rukman dan tidak mengaku bahwa bagian dari Divisi Siliwangi (Pustakaningrat, 1987). Hal ini dilakukan kemungkinan untuk menghindari penangkapan dari pihak Belanda yang sudah menguasai hampir wilayah Kuningan. Maka dari itu Mayor Rukman membentuk Kesatuan Gerakan Rakyat Merdeka (KGRM). Mayor Rukman dalam membentuk KGRM tidak mengetahui bahwa di Kuningan sudah ada badan perjuangan selama pasukan Divisi Siliwangi hijrah ke Yogyakarta, badan tersebut yakni KPRM pimpinan Iman Hidayat. Laskar yang dibentuk pada tanggal 26 September 1948 di Desa Kedungbungkus Kuningan. Mayor Rukman kemudian membentuk daerah operasi dan

pimpinan KGRM, adapun pembagian pimpinan daerah operasi di antaranya:

1. Kapten Mustafa Sudirja di wilayah Kuningan Timur-Cirebon Timur.
2. Kapten Machmud Pasya di wilayah Kuningan Utara dan Cirebon Barat.
3. Letnan Moh. Ilyas di wilayah Majalengka Utara dan Timur.
4. Kapten A. Sentot di wilayah Indramayu.
5. Kapten Rivai di wilayah Ujung Jaya dan Conggeang (Pustakaningrat, 1987).

Untuk menghindari bentrokan dan dalam upaya menjaga kekompakan ketika menghadapi Belanda diadakan perundingan segitiga antara KPRM, KGRM dan pemerintah sipil Keresidenan Cirebon. Dari KPRM diwakili oleh Imam Hidayat dan Achmad Bagdja, dari KGRM diwakili oleh Mayor Rukman dan Oesman Djatikusumah dan dari pemerintah sipil diwakili oleh Residen Abdurachman. Perundingan tersebut dilaksanakan di Pasir Panyeuseupan. Hasilnya terbentuklah Dewan Pimpinan Koordinasi (DPK) yang pimpinannya terdiri atas ketiga unsur tadi, pembagian tugas antara ketiga unsur tadi ditetapkan sebagai berikut:

1. Tugas untuk bertempur diserahkan kepada TNI/KGRM dan laskar Gerilya KPRM.
2. Tugas untuk urusan yang menyangkut masalah teritorial dan pemerintahan diserahkan kepada Pemerintahan Sipil Keresidenan Cirebon (Hermawan, 2000).

Pemerintahan Keresidenan Cirebon berada di Ciwaru dimulai dari akhir Juli 1947 hingga 31 Desember 1949. Pada tanggal 1 Januari 1950 pemerintahan sipil Keresidenan Cirebon kembali lagi ke Cirebon dan disusunlah aparatur pemerintahan baru di bawah naungan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pustakaningrat, 1987).

KESIMPULAN

Peristiwa revolusi kemerdekaan Indonesia yang terjadi di Kuningan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari revolusi kemerdekaan yang terjadi di wilayah Keresidenan Cirebon. Penyerangan pertama ke wilayah Keresidenan Cirebon terjadi pada tanggal 23 Juli 1947 dalam serangan ini Belanda berhasil menghancurkan fasilitas vital untuk berjalannya roda pemerintahan yang pada akhirnya memaksa Dewan Pertahanan Daerah Keresidenan Cirebon bersama pimpinan Brigade V/Siliwangi memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan dan pusat pertahanan ke wilayah pedalaman Kabupaten Kuningan.

Pasca pemindahan pusat keresidenan ke Kuningan, Belanda pun mencoba menyerang Kuningan yang mana serangan pertama terjadi pada tanggal 25 Juli 1947. Pola serangan pun diganti oleh Divisi Siliwangi dari pola linier menjadi gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda di Kuningan. pola gerilya yang dilaksanakan sangat efektif dikarenakan masih banyaknya wilayah hutan dan bantuan dari rakyat sangat besar di Kuningan.

Gempuran demi gempuran yang terus dilancarkan oleh Belanda akhirnya memaksa munculnya kesatuan KGRM dan KPRM yang dibentuk oleh rakyat dan laskar-laskar untuk membantu perjuangan militer di Kuningan. Akhirnya kecamuk revolusi yang terjadi di Kuningan beserta perjuangan yang dilakukan oleh militer maupun sipil mampu membawa Kuningan kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Pusat Keresidenan kembali dipindahkan dari Ciwaru, Kuningan ke Cirebon pada tanggal 1 Januari 1950.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. G. A. A. (1983). *Renville*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Dewan Harian Cabang '45 Kabupaten Kuningan. (2006). *Perjuangan Rakyat Kuningan Masa Revolusi Kemerdekaan*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Dian, A. (2007). *Revolusi Fisik di Desa Mandala Cirebon Tahun 1947 dan 1949*. (Skripsi). Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Dienaputra, R. D. (2011). *Sunda: Sejarah, Budaya dan Politik*. Bandung: Sastra Unpad Press.
- Ekadjati, E. S. (1980). *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Depdikbud.
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hermawan, W. (2000). *Kuningan Menembus Waktu*. Kuningan: Humas Pemda Kabupaten Kuningan.
- Lubis, N. H. (2003). *Sejarah Tatar Sunda Jilid 2*. Bandung : Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Nasution, A. H. (1979). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 6 dan 10*. Bandung: Angkasa.
- Nasution, A. H. (1984). *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa yang lalu dan yang Akan Datang*. Bandung: Angkasa.
- Pustakaningrat, I. (1987). *Cirebon Pada Masa Revolusi: Dari Linggarjati Hingga Pengakuan Kedaulatan*. (Skripsi) Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, Depok.
- Sewaka. (1955). *Tjorat Tjaret Dari Djaman ke Djaman*. Bandung.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Soetanto, H. (2007). *Long March Siliwangi*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Wawancara dengan E. Madrohim, Anggota Batalyon Umar, 2014.
- Wawancara dengan Juhari, Anggota Tentara Pelajar, 2014.
- Wawancara dengan M. Setiadi, Anggota IPI, 2014.
- Wawancara dengan Mulyadi, Anggota API Ciwaru, 2014.
- Wawancara dengan Sa'i, Anggota API Kuningan, 2014.
- Zakaria, M. M. (2011). *Peranan Tokoh Kuningan Dari Masa Pergerakan Hingga Revolusi Kemerdekaan*. Bandung: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.